

ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Ni Luh Candrawati¹
I D. G. Dharma Suputra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
e-mail: niluhcandrawati@gmail.com / Telp. +6283 114 374 245
²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar Tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan konsep *Value for Money* atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar Tahun 2008-2012 untuk rasio ekonomi rata-ratanya sebesar 86 persen dapat dikategorikan ekonomis, rasio efisiensi rata-ratanya sebesar 24,2 persen dapat dikategorikan sangat efisien, dan rasio efektivitas rata-ratanya sebesar 123,17 persen dapat dikategorikan sangat efektif. Dapat dikatakan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan konsep *Value for Money*.

Kata kunci: Kinerja Sektor Publik, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Pelayanan Pasar, *Value for Money*

ABSTRACT

This research was conducted in Gianyar District Revenue Office. This study aims to determine the level of economic, efficiency, and effectiveness of tax revenue, taxes restaurants and markets services levy Year 2008-2012. The results of this study the performance Gianyar District Revenue Office to be reviewed based on the concept of Value for Money on hotel tax revenue, restaurant tax, and fees for the 2008-2012 service year market economies the average ratio of 86 percent can be categorized as economic, efficiency ratios mean means are 24,2 percent can be categorized as very efficient, and the average effectiveness ratio of 123,17 percent can be categorized as very effective. It can be said the performance of the Department of Revenue in the Gianyar regency hotel tax, restaurant tax, and levy service markets are in accordance with the concept of Value for Money.

Keywords: Public Sector Performance, Hotel Tax, Restaurant Tax, Levies Market Service, *Value for Money*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia telah diberlakukan selama 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah,

daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung segala pembiayaan daerah (Lumentah, 2013). Tujuan dari adanya otonomi daerah salah satunya adalah untuk pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi di dalam kerangka pembangunan nasional (Yustri, 2013). Peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan daerah diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan di masing-masing daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

World Bank (1997) dalam Khusnaini (2006:66) menyatakan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dengan menggunakan konsep *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan (Nugrahini, 2007). *Value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (Indra Bastian, 2006: 280). Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan anggaran belanja agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal.

Sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*), memerlukan pengelolaan dana masyarakat yang berdasarkan pada konsep *value for money*. Salah satu sumber dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial selain pajak dan retribusi. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut (Ruswandi, 2009).

Kabupaten Gianyar merupakan daerah otonom dengan luas wilayah 36.800 hektar dengan jumlah penduduk 469.777 orang, dan terletak di Provinsi Bali (BPS Kab. Gianyar, 2012). Potensi yang paling menonjol dari Kabupaten Gianyar adalah pada sektor pariwisata, karena Kabupaten Gianyar memiliki kebudayaan yang beraneka ragam yang meliputi adat istiadat maupun kesenian (Suartini dan Utama, 2013). Sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar berkaitan dengan sektor lainnya, seperti : perdagangan, hotel, dan restoran. Berbagai sektor tersebut dapat menyumbang pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pelayanan pasar. Wartini dan Lingga, 2010 berpendapat bahwa semua daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak didaerahnya, demikian pula Kabupaten Gianyar pendapatan yang dipungut dapat digunakan penambah dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 1.
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha	Lain-lain Pendapatan	PAD
2008	57.202	31.812	2.599	5.307	96.922
2009	67.377	15.419	2.595	27.332	112.598
2010	90.334	21.283	5.094	36.92	153.633
2011	133.959	26.011	6.103	43.523	209.598
2012	159.636	30.4	5.34	66.069	261.447

Sumber: Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2013.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini, salah satunya dipengaruhi oleh naiknya pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar. Selain pajak hotel dan restoran, retribusi pelayanan pasar merupakan aspek yang penting yang dapat menentukan naik turunnya pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Mengingat Kabupaten Gianyar adalah daerah wisata tentu saja hotel, restoran, dan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kabupaten Gianyar memiliki 395 hotel/akomodasi diantaranya 13 buah hotel berbintang, 378 hotel non bintang, 4 penginapan lainnya. Di Kabupaten Gianyar juga terdapat 497 buah restoran/rumah makan yang pajaknya dapat di manfaatkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, sektor lainnya yang berhubungan erat dengan sektor pariwisata adalah sektor perdagangan. Pada Tabel 1 dapat kita lihat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar.

Tabel 2.
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Retribusi Pelayanan Pasar
2008	39%	6%	4%
2009	36%	6%	3,60%
2010	32%	8%	2,60%
2011	29%	8,60%	2%
2012	24%	8,10%	1,50%

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya mengalami pluktuasi yang cukup signifikan. Dalam tabel ini juga terlihat bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan pajak restoran dan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Gianyar. Penurunan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti : kurang efektifnya kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak, dan berkurangnya wajib pajak yang sadar akan kewajibannya. Namun, mengukur kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak dan retribusi tidak dapat dilihat dari kontribusi semata. Pencapaian dalam penerimaan pajak dan retribusi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak dan retribusi. Target dan realisasi untuk pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar, dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2012 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Retribusi Pelayanan Pasar	
	Taget	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2008	23.84	37.7	4.622	5.886	3.855	3.894
2009	37.972	41.056	5.627	6.859	4.105	4.096
2010	42.644	50.519	8.375	12.413	4.105	4.116
2011	47.578	60.895	14.437	18.214	4.139	4.202
2012	56.5	64.891	19	21.213	4.639.	3.971

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Tabel 3 menunjukkan pencapaian maksimal pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar. Dari Tabel 3 tercermin bahwa dari target yang telah ditetapkan tersebut belum tentu mencerminkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nugrahani (2007) menyatakan bahwa karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Sedangkan, retribusi pelayanan pasar pada tahun 2009 dan 2012 mengalami penurunan dalam pencapaian target. Penurunan ini tentunya mengindikasikan terdapat penurunan kinerja dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar yang nantinya dapat diteliti melalui *value for money*.

Penelitian mengenai pengukuran kinerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Arya Semadi (2005) menyimpulkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Klungkung ditinjau dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang cukup baik. Shita Unjaswat Ekawarna, Iskandar Sam, dan Sri Rahayu (2009) menyatakan bahwa hasil pengukuran menunjukkan bahwa rasio efektivitas tinggi, rasio efisiensi

rendah, dan rasio pertumbuhan semakin meningkat. Sedangkan rasio kemandirian dan rasio aktivitas masih rendah. Kinerja APBD Pemda Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum baik. Sedangkan, Ratih Iswari (2011) yang mengukur kinerja aspek finansial dan non-finansial perusahaan daerah pasar Kota Denpasar menyatakan Rasio ekonomis secara rata-rata selama tahun 2001-2010 berada pada kriteria yang tidak ekonomis. Rasio efisiensi secara rata-rata selama tahun 2001-2010 berada pada kriteria yang kurang efisien. Rasio efektivitas secara rata-rata selama tahun 2001-2010 berada pada kriteria yang efektif. Kinerja aspek non-finansial melalui perspektif kepuasan pedagang pasar dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar merasa cukup puas dengan pelayanan dan jasa yang telah diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Manik No. 14 Gianyar, Bali. Objek penelitian yaitu penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012. Objek penelitian ini dipilih karena mengingat penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar dalam Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi dan berfluktuasi. Alasan dipilihnya tahun anggaran 2008-2012 adalah, karena pada tahun 2008 terjadi krisis global di Negara Amerika yang juga berdampak bagi banyak negara tidak terkecuali Indonesia. Penulis disini ingin mengetahui apakah krisis global pada tahun 2008 memberikan dampak terhadap ekonomi pasar dan

kunjungan wisatawan yang datang ke Bali khususnya wisatawan yang berkunjung ke hotel, restoran, dan pasar yang ada di Gianyar . Selain itu penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar. Rentang waktu selama 5 (lima) tahun terakhir diharapkan data yang diperoleh akan memberikan informasi yang dapat menggambarkan sejauh mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai secara langsung dengan pimpinan dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar, anggaran biaya dan realisasi biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar, gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta visi dan misi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan retribusi pelayanan pasar berdasarkan *value for money*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar

Berdasarkan konsep *value for money*, untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar perlu dilihat target dan realisasi penerimaan dan/atau pengeluarannya. Selama ini kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maksimal dari target pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan atau realisasi penerimaan yang melebihi target. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dinilai baik apabila penerimaannya mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan, dan begitu pula sebaliknya apabila pencapaiannya dibawah target maka kinerjanya dinilai kurang baik.

Biaya untuk Memungut Pajak dan Retribusi Daerah

Biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar hanya berupa Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM). Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa hanya biaya BBM saja yang timbul pada saat pemungutan pajak. Beliau mengatakan pula bahwa upah makan pegawai yang memungut pajak ataupun bonus sudah termasuk kedalam biaya tenaga kerja dan bukan termasuk biaya dalam memungut pajak. Berikut data anggaran dan realisasi biaya untuk memungut pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.

Tabel 4.
Anggaran dan Realisasi Biaya untuk Memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Anggaran Biaya Untuk Memungut PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Realisasi Biaya Untuk Memungut PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)
2008	184.600.000	169.500.000
2009	165.000.000	142.000.000
2010	158.200.000	148.000.000
2011	169.000.000	134.500.000
2012	255.600.000	198.000.000

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Analisis Rasio Ekonomi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

Ekonomis berhubungan dengan biaya operasi, dengan kata lain kita ingin menilai apakah suatu kegiatan atau operasi telah dilaksanakan dengan tingkat biaya yang minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang ingin dicapai. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:160), ekonomi berarti kemampuan untuk memperoleh sumber daya dengan harga lebih rendah (mendekati harga pasar). Menurut Mahsun (2009:186) kriteria rasio ekonomi apabila persentase di bawah 100 persen berarti ekonomis, persentase sama dengan 100 persen berarti ekonomis berimbang, dan persentase di atas 100 persen berarti tidak ekonomis.

Tabel 5 menjelaskan rata-rata rasio ekonomi sebesar 86%. Rata-rata rasio ekonomi ini tergolong ekonomis karena nilai rasio berada dibawah 100%. Rasio ekonomi yang terlihat pada Tabel 5 memiliki nilai rasio ekonomi yang berfluktuasi. Hal ini bisa terlihat pada tahun 2008 sebesar 92% kemudian pada tahun 2009 turun menjadi 86%. Tahun 2010 rasio ekonomi naik kembali hampir

mendekati nilai 100% yang berarti hampir mendekati ekonomis berimbang dan kemudian turun lagi menjadi 80% di tahun 2011.

Tabel 5.
Rasio Ekonomi atas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi Biaya Untuk Memungut PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Anggaran Biaya Untuk Memungut PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Rasio Ekonomi (100%)
2008	169,5	184,6	92
2009	142	165	86
2010	148	158,2	94
2011	134,5	169	80
2012	198	255,6	77
Rata-rata rasio ekonomi			86

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Tabel 5 menjelaskan rata-rata rasio ekonomi sebesar 86%. Rata-rata rasio ekonomi ini tergolong ekonomis karena nilai rasio berada dibawah 100%. Rasio ekonomi yang terlihat pada Tabel 5 memiliki nilai rasio ekonomi yang berfluktuasi. Hal ini bisa terlihat pada tahun 2008 sebesar 92% kemudian pada tahun 2009 turun menjadi 86%. Tahun 2010 rasio ekonomi naik kembali hampir mendekati nilai 100% yang berarti hampir mendekati ekonomis berimbang dan kemudian turun lagi menjadi 80% di tahun 2011.

Analisis Rasio Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

Menurut Halim (2007:234), kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 6.
Rasio Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Realisasi Penerimaan PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2008	169,5	47.480	35,7	Sangat efisien (< 60%)
2009	142	52.012	27	Sangat efisien (< 60%)
2010	148	67.049	22	Sangat efisien (< 60%)
2011	134,5	83.312	16	Sangat efisien (< 60%)
2012	198	90.076	21	Sangat efisien (< 60%)
Rata-rata	158,4	67.985	24,2	Sangat Efisien (< 60%)

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Tabel 6 menjelaskan rata-rata rasio efisiensi sebesar 24,2%. Rata-rata rasio efisiensi yang ditunjukkan oleh Tabel 6 tergolong sangat efisien karena berada di bawah 60%. Rasio efisiensi yang terlihat pada Tabel 6 tidak memiliki nilai rasio yang berfluktuasi. Persentase rasio semakin efisien pada tahun 2011 yaitu sebesar 16%. Hasil ini juga memberikan makna bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar semakin efisien dalam penggunaan biaya untuk memperoleh pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Nordiawan dan Hertianti, 2010:160). Kriteria rasio efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-397 Tahun 1996 adalah apabila persentase di atas 100 persen berarti sangat efektif, persentase 90-100 persen berarti efektif, persentase 80-90 persen berarti cukup efektif, persentase 60-80

persen berarti kurang efektif, dan persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

Tabel 7.
Rasio Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Realisasi Penerimaan PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar(Rp)	Target Penerimaan PHR, dan Retribusi Pelayanan Pasar(Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2008	47.480	32.319	146,91	Sangat efektif (>100%)
2009	52.012	47.705	109,03	Sangat efektif (>100%)
2010	67.049	55.125	121,63	Sangat efektif (>100%)
2011	83.312	66.155	125,93	Sangat efektif (>100%)
2012	90.076	80.139	112,39	Sangat efektif (>100%)
Rata-rata	56.288	67.985	123,17	Sangat efektif (>100%)

Sumber: Dispenda Kabupaten Gianyar, 2013

Tabel 7 menjelaskan rata-rata rasio efektivitas sebesar 123,17%. Rata-rata rasio efektivitas yang ditunjukkan oleh Tabel 7 tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Perolehan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, maka dari itu kinerja lima tahun terakhir sudah sangat baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dengan menggunakan konsep *Value for Money* jika ditinjau dari sudut rasio ekonomi tergolong ekonomis karena menunjukkan nilai rasio di bawah 100% yaitu sebesar 86%. Selain itu jika ditinjau dari sudut rasio efisiensi tergolong sangat efisien karena menunjukkan nilai rasio di bawah 60% yaitu sebesar 24,2%. Jika ditinjau dari

sudut rasio efektivitas tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio di atas 100% yaitu sebesar 123,17%.

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini yaitu pada penggunaan biaya yang hanya mencakup data biaya bahan bakar minyak (BBM). Penulis mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar karena untuk rasio ekonomi dan efisiensi hanya menggunakan input biaya BBM saja.

Saran yang dapat diberikan untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar antara lain perlunya diadakan evaluasi dalam penggunaan biaya yang dikeluarkan saat memungut pajak. Biaya lain yang mungkin muncul misalnya biaya konsumsi dan insentif lainnya kepada petugas memungut pajak dan retribusi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar juga perlu mempertimbangkan kembali penetapan jumlah target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari pencapaian target yang maksimal dari pajak dan retribusi daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar harus mempertahankan dan meningkatkan lagi prestasi pengelolaan keuangannya. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang kendala di lapangan akan menghambat penerimaan pajak dan retribusi sehingga mengurangi pendapatan asli daerah.

REFERENSI

Arya Semadi, I Putu. 2005. Penelitian Kinerja PDAM Kabupaten Klungkung dengan Menggunakan Balanced Scorecard Periode 2001-2005. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistic of Gianyar*, Gianyar Dalam Angka.

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar. 2012.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyawati, Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2. Yogyakarta : BPFE.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-1. Yogyakarta : BPFE
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *AKMENIKA UPY*. Vo.1. No.1.
- Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. 2012.
- Ruswandi, Rina Rahmawati. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Suartini dan Utama. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar tahun anggaran 1991-2010. *Jurnal Fakultas Ekonomi Udayana*. Denpasar. Vol. 2, No.3.
- Theresia, Gladys. 2013. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Milik Negara dan Milik Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*. Vol 1 No.4.
- World Bank. 1997b. *On Line Source Book on Decentralization and Rural Development, Decentralization Thematic Team, SDA*.
- Yustri, Devi. 2013. Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Dalam Memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Tahun 2008-2012. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Pajak Hotel.

_____. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pajak Restoran.

_____. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2011. Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.